

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kontribusi Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor. Data penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner kepada pegawai/staf bagian akuntansi di SKPD Kabupaten Biak Numfor.

B. Uji Kualitas Instrumen dan Data

1. Uji Statistik Deskriptif

Untuk mengetahui data pada penelitian ini digunakan analisis deskriptif. Ringkasan hasil analisis deskriptif statistik yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

a. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

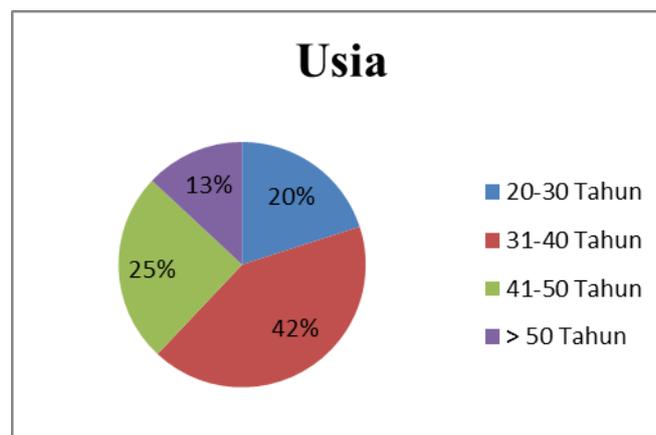
Tabel 4.1

Distribusi Responden Berdasarkan Usia

Kategori	Frekuensi	Prosentase
20-30 Tahun	20	20.0
31-40 Tahun	42	42.0
41-50 Tahun	25	25.0
> 50 Tahun	13	13.0
Total	100	100.0

Sumber : data primer 2018

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan usiakepala dan staf bagian akuntansi dan keuangan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Biak Numfor, sebagian besar adalah responden termasuk dalam kategori 31-40 tahun yaitu sebanyak 42 responden (42,0%).



Gambar 4.2 Diagram Usia

b. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2

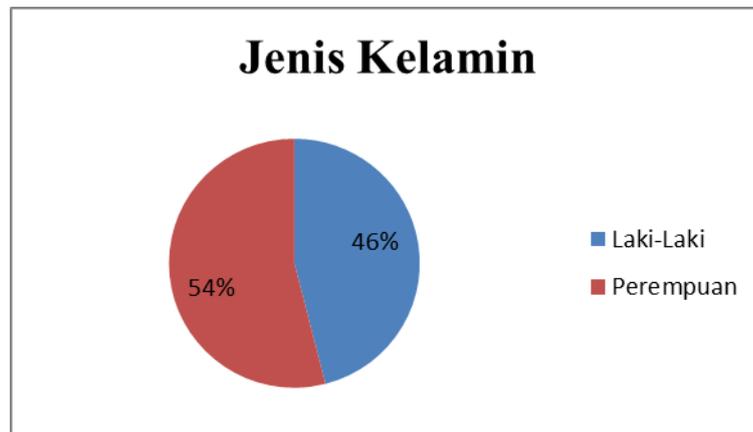
Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Laki-Laki	46	46.0
Perempuan	54	54.0
Total	100	100.0

Sumber : data primer 2018

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin kepala dan staf bagian akuntansi dan keuangan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Biak Numfor, sebagian

besar adalah responden termasuk dalam kategori perempuan yaitu sebanyak 54 responden (54,0%).



Gambar 4.1 Diagram Jenis Kelamin

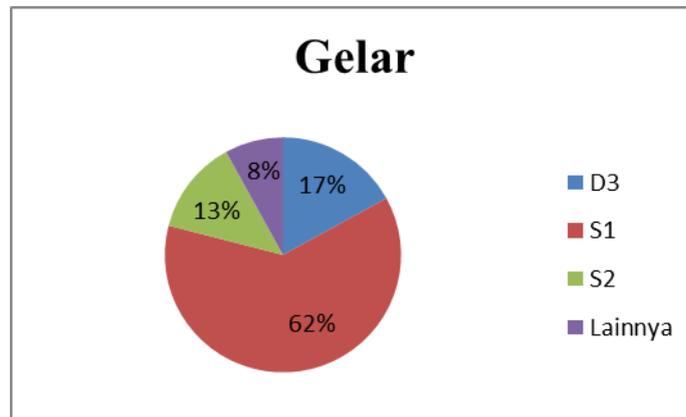
c. Karakteristik Responden Berdasarkan Gelar

Tabel 4.3
Distribusi Responden Berdasarkan Gelar

Kategori	Frekuensi	Prosentase
D3	17	17.0
S1	62	62.0
S2	13	13.0
Lainnya	8	8.0
Total	100	100.0

Sumber : data primer 2018

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan gelar kepala dan staf bagian akuntansi dan keuangan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Biak Numfor, sebagian besar adalah responden termasuk dalam kategori S1 yaitu sebanyak 62 responden (62,0%).



Gambar 4.3 Diagram Gelar

d. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

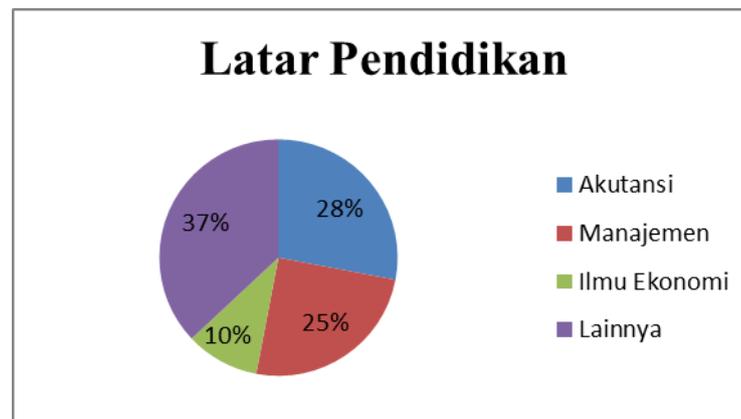
Tabel 4.4

Distribusi Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Kategori	Frekuensi	Prosentase
Akutansi	28	28.0
Manajemen	25	25.0
Ilmu Ekonomi	10	10.0
Lainnya	37	37.0
Total	100	100.0

Sumber : data primer 2018

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan latar belakang pendidikan kepala dan staf bagian akuntansi dan keuangan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Biak Numfor, sebagian besar adalah responden termasuk dalam kategori lainnya yaitu sebanyak 37 responden (37,0%).



Gambar 4.4 Diagram Pendidikan

2. Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Hal yang dilakukan sebelum menunjukkan bahwa semua indikator pernyataan layak dijadikan instrumen penelitian adalah melakukan uji sampel besar sebanyak 100 responden. Tingkat signifikansi 5% jika probabilitas $< 0,05$ maka pernyataan tersebut valid. Sedangkan jika nilai probabilitas $\geq 0,05$ maka pernyataan tersebut tidak valid (Ghozali, 2011). Berikut ini adalah hasil uji validitas:

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas dari Item – Item Variabel Penelitian

Variabel	Item Pertanyaan	R hitung	Sig	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia	X1.1	0.761	0,000	Valid
	X1.2	0.716	0,000	Valid
	X1.3	0.759	0,000	Valid
	X1.4	0.770	0,000	Valid
	X1.5	0.783	0,000	Valid
	X1.6	0.771	0,000	Valid
	X1.7	0.809	0,000	Valid
	Item	R hitung	Sig	Keterangan

	Pertanyaan			
	X1.8	0.836	0,000	Valid
	X1.9	0.848	0,000	Valid
	X1.10	0.748	0,000	Valid
	X1.11	0.784	0,000	Valid
	X1.12	0.859	0,000	Valid
	X1.13	0.818	0,000	Valid
	X1.14	0.788	0,000	Valid
	X1.15	0.718	0,000	Valid
	X1.16	0.759	0,000	Valid
	X1.17	0.713	0,000	Valid
	X1.18	0.743	0,000	Valid
	X1.19	0.632	0,000	Valid
Standar Akuntansi Pemerintah	X2.1	0.879	0,000	Valid
	X2.2	0.903	0,000	Valid
	X2.3	0.878	0,000	Valid
	X2.4	0.894	0,000	Valid
	X2.5	0.848	0,000	Valid
	X2.6	0.889	0,000	Valid
	X2.7	0.881	0,000	Valid
	X2.8	0.876	0,000	Valid
	X2.9	0.890	0,000	Valid
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	X3.1	0.870	0,000	Valid
	X3.2	0.829	0,000	Valid
	X3.3	0.812	0,000	Valid
	X3.4	0.837	0,000	Valid
	X3.5	0.799	0,000	Valid
	X3.6	0.763	0,000	Valid
	X3.7	0.796	0,000	Valid
	X3.8	0.848	0,000	Valid
	X3.9	0.873	0,000	Valid
	X3.10	0.779	0,000	Valid
	X3.11	0.803	0,000	Valid
	X3.12	0.812	0,000	Valid
	X3.13	0.794	0,000	Valid
	X3.14	0.805	0,000	Valid
X3.15	0.772	0,000	Valid	
X3.16	0.823	0,000	Valid	
X3.17	0.839	0,000	Valid	
X3.18	0.819	0,000	Valid	
X3.19	0.739	0,000	Valid	
X3.20	0.788	0,000	Valid	
X3.21	0.810	0,000	Valid	
X3.22	0.766	0,000	Valid	

Variabel	Item Pertanyaan	R hitung	Sig	Keterangan
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Y.1	0.718	0,000	Valid
	Y.2	0.830	0,000	Valid
	Y.3	0.750	0,000	Valid
	Y.4	0.762	0,000	Valid
	Y.5	0.834	0,000	Valid
	Y.6	0.827	0,000	Valid
	Y.7	0.833	0,000	Valid
	Y.8	0.789	0,000	Valid
	Y.9	0.796	0,000	Valid
	Y.10	0.857	0,000	Valid
	Y.11	0.834	0,000	Valid
	Y.12	0.859	0,000	Valid
	Y.13	0.747	0,000	Valid
	Y.14	0.826	0,000	Valid
	Y.15	0.877	0,000	Valid
	Y.16	0.743	0,000	Valid

Sumber: hasil olah data 2018

Berdasarkan hasil uji validitas dengan jumlah 100 responden dapat diketahui bahwa seluruh pernyataan mengenai Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah yang diajukan untuk responden kepala dan staf bagian akuntansi dan keuangan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Biak Numfor adalah valid karena dilihat dari tingkat signifikan $< 0,05$, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan yang ada dalam kuesioner tersebut dapat dikatakan layak sebagai instrumen untuk mengukur data penelitian.

b. Uji Reliabilitas

Hal yang dilakukan setelah menunjukkan bahwa semua variabel pernyataan layak dijadikan instrumen penelitian adalah melakukan uji sampel besar sebanyak 100 responden. Pernyataan dapat dikatakan reliabel jika nilai Cronbach's Alpha > 0,6 (Ghozali, 2011). Berikut ini adalah hasil uji reliabel:

Tabel 4.6

Hasil Uji Reliabilitas Item – Item Variabel Penelitian

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0.961	Reliabel
Standar Akuntansi Pemerintah	0.964	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0.974	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	0.964	Reliabel

Sumber: hasil olah data 2018

Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji reliabilitas dari 100 responden dapat diketahui bahwa nilai Cronbach's Alpha dari variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dapat disimpulkan bahwa semua variabel dalam pernyataan dinyatakan reliabel karena telah memenuhi nilai yang disyaratkan yaitu dengan nilai Cronbach Alpha > 0,6.

3. Analisis Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang dipakai dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinieritas.

a. Uji Normalitas

Uji ini adalah untuk menguji apakah pengamatan berdistribusi secara normal atau tidak, uji ini menggunakan kolmogorov smirnov. Hasil uji Normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.7. Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.00708021
	Absolute	.096
Most Extreme Differences	Positive	.096
	Negative	-.069
Kolmogorov-Smirnov Z		.959
Asymp. Sig. (2-tailed)		.317

Sumber : Data Primer2018

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat diketahui nilai *asymp.sig* sebesar 0,317 >0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Suatu asumsi penting dari model regresi linier klasik adalah bahwa gangguan (*disturbance*) yang muncul dalam regresi adalah

homoskedastisitas, yaitu semua gangguan tadi mempunyai varian yang sama. Hasil uji Heteroskedastisitas dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.8. Uji Heteroskedastisitas

Variabel	sig	batas	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0.149	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas
Standar Akuntansi Pemerintah	0.089	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0.524	>0,05	Tidak terjadi heterokedasitas

Sumber : Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel 4.8 dapat diketahui bahwa nilai probabilitas lebih besar dari 5%, dengan demikian variabel yang diajukan dalam penelitian tidak terjadi heterokedasitas.

c. Uji Multikolineartias

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada atau tidaknya multikolinieritas maka dapat dilihat dari nilai *Varians Inflation Factor* (VIF) dan *tolerance* (α).

Tabel 4.9. Uji Multikolineartias

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0.662	1.511	Tidak terjadi multikolinieritas
Standar Akuntansi Pemerintah	0.685	1.459	Tidak terjadi multikolinieritas
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0.599	1.670	Tidak terjadi multikolinieritas

Sumber : Data Primer, 2018

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai *tolerance value* > 0,10 atau nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinieritas.

4. Analisis Regresi Berganda

Untuk menguji pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah digunakan analisis regresi linier berganda. Dalam model analisis regresi linier berganda akan diuji secara simultan (uji F) maupun secara parsial (uji t). Ketentuan uji signifikansi uji F dan uji t adalah sebagai berikut:

Menerima H_a : jika probabilitas $(p) \leq 0,05$ artinya Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara simultan maupun parsial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

Ringkasan hasil analisis regresi linier berganda yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variabel	B	t hitung	Sig t	Keterangan
(Constant)	3.962			
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0.124	2.815	0.006	Signifikan
Standar Akuntansi Pemerintah	0.222	2.604	0.011	Signifikan
Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	0.487	11.234	0.000	Signifikan
F hitung	115.316			
Sig F	0.000			
Adjusted R Square	0.776			

Sumber : Data primer2018

a. Uji Regresi Simultan (uji F)

Berdasarkan Regresi Simultan, diperoleh nilai F-hitung sebesar 115,316 dengan probabilitas (p) = 0,000. Berdasarkan ketentuan uji F dimana nilai probabilitas (p) ≤ 0,05, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara simultan mampu memprediksi perubahan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

b. Uji Regresi Parsial (uji t)

$$Y = 3.962 + 0.124X_1 + 0.222X_2 + 0.487X_3 + e$$

1) Kompetensi Sumber Daya Manusia

Berdasarkan uji regresi parsial, diperoleh nilai t-hitung sebesar 2,815 koefisien regresi (beta) 0,124 dengan probabilitas (p) = 0,006. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai probabilitas (p) ≤ 0,05 dapat

disimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Ini menunjukkan semakin baik Kompetensi Sumber Daya Manusiayang dirasakan oleh kepala dan staf bagian akuntansi dan keuangan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Biak Numfor secara otomatis akan mampu meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

2) Standar Akuntansi Pemerintah

Berdasarkan uji regresi parsial, diperoleh nilai t-hitung sebesar 2.604 koefisien regresi (beta) 0,222 dengan probabilitas (p) = 0,011. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai probabilitas (p) \leq 0,05 dapat disimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Ini menunjukkan semakin baik Standar Akuntansi Pemerintah yang dirasakan oleh kepala dan staf bagian akuntansi dan keuangan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Biak Numfor secara otomatis akan mampu meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

3) Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Berdasarkan uji regresi parsial, diperoleh nilai t-hitung sebesar 11,234 koefisien regresi (beta) 0,487 dengan probabilitas (p) = 0,000. Berdasarkan hasil olah data dimana nilai probabilitas (p) \leq 0,05 dapat

disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Ini menunjukkan semakin baik Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang dirasakan oleh kepala dan staf bagian akuntansi dan keuangan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Biak Numfor secara otomatis akan mampu meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Besar pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah secara simultan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah ditunjukkan oleh nilai Adjusted R Square sebesar 0,776. Artinya, 77,6% Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah dipengaruhi oleh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 2,815 dengan probabilitas 0,006 dimana angka tersebut signifikan karena ($p \leq 0,05$). Artinya

SDM yang ada di SKPD Kabupaten Biak Numfor memiliki tiga indikator yaitu pengetahuan, keterampilan atau keahlian dan sikap perilaku, Sehingga semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah,

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitasnya, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*) (Nordiwan, 2008).

Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) tidak sesuai dengan pendidikannya diluar akuntansi, maka akan berdampak terhadap Kualitas laporan keuangan daerah. Sehingga, kualitas laporan keuangan tersebut menjadi tidak akurat karena tidak dikelola oleh SDM yang berlatar belakang pendidikan akuntansi. Untuk kedepannya agar kualitas laporan keuangan daerah tersebut menjadi lebih akurat, efektif, dan efisien harus ditata ulang kembali manajemennya dengan SDM yang ahli dalam bidangnya yaitu lebih mengutamakan aparat-aparat pemerintah yg berlatar belakang pendidikan akuntansi (Roviyantie, 2011).

Sumber Daya Manusia (SDM) dapat melaksanakan sistem akuntansi jika tidak memiliki kapasitas dan kompetensi yang disyaratkan, maka dapat menimbulkan kendala dalam melaksanakan fungsi akuntansi, maka kualitas

sistem akuntansi menjadi buruk. Jika semakin baik kapasitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia, maka semakin baik juga kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Devie, 2013).

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anggraeni dan Riduwan (2014) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Dan didukung oleh penelitian dari Roviyantje (2011) tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan daerah menunjukkan bahwa Kompetensi SDM berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

2. Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 2.604 dengan probabilitas 0,011 dimana angka tersebut signifikan karena ($p \leq 0,05$). Artinya SAP yang ada di SKPD Kabupaten Biak Numfor memiliki tiga indikator yaitu penerapan basis akrual, penerapan basis kas dan penyajian secara wajar, Sehingga semakin baik standar akuntansi pemerintah maka semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010, Standar akuntansi pemerintahan diartikan sebagai prinsip-prinsip akuntansi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), serta disusun dengan mengacu kepada Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

Suatu pemerintahan yang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan akan menghasilkan laporan keuangan yang sangat diperlukan dalam lingkungan pemerintahan. Dengan Standar Akuntansi Pemerintahan diharapkan agar semuanya berjalan dengan terstruktur dan sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga akan dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat terutama laporan keuangan yang keberadaannya sangat penting dan dibutuhkan untuk dipertanggung jawabannya (Vicky, 2012).

Adanya Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemerintah harus menerapkan dan mempraktekkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas dalam rangka membentuk suatu tata pemerintahan yang baik (Good Governance)(Desiana, 2014).

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas dan Widyawati (2016) tentang pengaruh efektivitas penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa efektifitas penerapan standar akuntansi pemerintahan

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dan didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Sudiarianti, dkk (2015) tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia pada penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan standar akuntansi pemerintah serta implikasinya pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. Hal tersebut terbukti dengan nilai t hitung sebesar 11,234 dengan probabilitas 0,000 dimana angka tersebut signifikan karena ($p \leq 0,05$). Artinya SDM yang ada di SKPD Kabupaten Biak Numfor memiliki lima indikator yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan, Sehingga semakin baik sistem pengendalian internal pemerintah maka semakin baik kualitas laporan keuangan pemerintah,

Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Rivai, 2011).

Harus disadari bahwa terdapat banyak pihak yang akan mengandalkan informasi laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu informasi dalam laporan keuangan harus berkualitas, informasi dalam laporan keuangan yang akan dipublikasikan tersebut harus disajikan secara wajar terbebas dari salah saji yang material sehingga tidak menyesatkan para penggunanya, laporan keuangan hanya akan bermanfaat jika laporan keuangan yang diinformasikan disajikan dengan valid dan dapat diandalkan. Jika laporan keuangan yang dipublikasikan buruk, artinya laporan keuangan tersebut dihasilkan dari sistem akuntansi yang buruk sehingga didalamnya mengandung kesalahan yang material dalam penyajian, tidak disusun sesuai dengan standar pelaporan, dan tidak tepat waktu dalam penyampainnya maka hal itu akan berdampak buruk bagi para pengguna laporan dan pihak penyaji laporan itu sendiri (Angga, 2013).

Hasil ini sejalan dengan penelitian oleh Candrakusuma dan Jatmiko (2017) tentang dampak komitmen organisasi, sistem pengendalian internal pemerintah, akuntabilitas publik, partisipasi anggaran dan kejelasan sasaran anggaran terhadap kinerja manajerial bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pada satuan kerja perangkat daerah. Dan didukung oleh penelitian yang dilakukan Sembiring (2013) tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah menunjukan

bahwa sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah